



Gubernur Lemhannas RI:

"Hasil Pemeriksaan BPK RI ini dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas Lemhannas RI"

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terjalannya kerja sama yang konstruktif antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan seluruh unit kerja di lingkungan Lemhannas RI. Hal tersebut disampaikan pada acara Taklimat Akhir Pemeriksaan BPK RI di Ruang Nusantara I Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jumat (22/3).

bersambung ke hal. 2



Pada dasarnya kegiatan pemeriksaan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang dilakukan BPK RI, bertujuan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Oleh karena itu, sejalan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, Lemhannas RI memberikan dukungan penuh kepada BPK RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi terwujudnya *good governance and clean government*.

Selama pemeriksaan oleh BPK RI yang dilakukan sejak bulan Januari lalu, proses dan rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dalam suasana kerjasama yang baik dan kondusif. Melihat hal itu, Gubernur mengatakan bahwa Tim Pemeriksa dari BPK RI telah menjalankan tugasnya dengan baik, menunjukkan dedikasi dan kerjasama yang konstruktif dengan Lemhannas RI. Begitu pula dengan seluruh unit kerja yang telah berupaya keras dan bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan pemeriksaan tersebut berjalan efisien dan efektif.

“Jangan ragu-ragu untuk melakukan perbaikan dan pembenahan agar harapan Lemhannas RI menjadi *world class institution* segera terwujud”, tegasnya

Gubernur berharap hasil pemeriksaan BPK RI ini akan dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas Lemhannas RI dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Negara.

Selain dihadiri sejumlah pejabat dari Lemhannas RI seperti Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama dan para Deputy, dihadiri pula oleh Auditor Utama BPK RI Gatot Supiartono dan Tim Pemeriksa BPK RI.



Foto: Humas Lemhannas

DAFTAR ISI

- 
1 Gubernur Lemhannas RI: “Hasil Pemeriksaan BPK RI ini dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas Lemhannas RI”
- 
3 Sudah Saatnya Pemanfaatan Nuklir Dikaji Secara Mendalam
- 
4 UMKM Harus Diletakkan Dalam Koridor Kondisi, Perilaku Dan Budaya Usaha
- 
5 Pembangunan di Papua Perlu Mendapatkan Prioritas
- 
6 Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI Dengan Universitas Mulawarman
- 
7 Sekolah Bukan Sekedar Tempat *Transfer of Knowledge*
- 
8 Perlu Formulasi Kebijakan Untuk Perkuat Pembangunan Perekonomian Kelautan
- 
9 Perumusan Isu-Isu Strategis Ketahanan Nasional
- 
10 Generasi Muda Sebagai *Role Model*
- 
11 Peran Isteri/Suami Selaku Pendamping Peserta P3DA Sebagai Pimpinan Daerah Tidak Bisa Dikesampingkan

REDAKSI

Pengarah :
Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :
Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :
Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :
Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :
Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :
Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :
Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indiah Winarni.

Distribusi :
Letkol Inf. Sumurung, , Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :
Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926, Website <http://www.lemhannas.go.id>

Sudah Saatnya Pemanfaatan Nuklir Dikaji Secara Mendalam



Foto : Humas Lemhannas

“Sumber energi fosil yang kita miliki sudah terbatas, sehingga kita harus mencari sumber energi alternatif.”

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE saat membacakan *keynote speech* Gubernur Lemhannas RI dalam acara *Roundtable Discussion* Kajian Aktual pada hari Selasa, (26/3) di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Roundtable Discussion dengan moderator Tenaga Ahli Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA ini menghadirkan 3 orang narasumber yaitu Staf Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Dr. Marwansyah Lobo Balia, M.Sc., Kepala Divisi Perencanaan Sistem Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ir. Djoko Prasetyo, dan Guru Besar Fisika Universitas Indonesia Prof. Dr. Terry Mart. Selain narasumber, turut hadir para penanggap, yaitu Kepala Green Peace Indonesia Longgena Ginting, Kepala Bapeten (Badan pengawas Tenaga Nuklir), dan 2 orang penanggap dari Lemhannas RI Ir. Timotius D. Harsono, M.Sc dan Dr. Drs. Harry Indradjit Soeharjono, SE, MM.

Terlepas dari pemanfaatannya sebagai senjata perang, tenaga Nuklir telah dipergunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti energi, kedokteran, pertanian, industri, peternakan dan sebagainya. Menurut Wakil Gubernur Lemhannas RI, minyak bumi (BBM), Gas dan Batubara merupakan komoditi-komoditi andalan sebagai sumber devisa yang selama ini dianggap sebagai komoditi-komoditi andalan di bidang energi. Padahal

sumber energi perlu ditata ulang agar secara strategis dapat menyesuaikan dengan gerak pembangunan nasional.

Kebutuhan masyarakat saat ini akan energi listrik terus bertambah, disisi lain harus diakui bahwa sumber energi fosil yang dimiliki sangat terbatas. “...kita harus mencari sumber energi alternatif, salah satunya adalah energi nuklir yang bisa dijadikan sebagai tenaga pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)”, ucap Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Menurutnya ada beberapa alasan, mengapa Nuklir dijadikan sebagai sumber energi alternatif yaitu pertama, makin menipisnya cadangan energi yang terkandung diperut bumi terutama minyak bumi (fosil). Kedua, meski cadangan baru terus ditemukan, rasio kecepatan penemuan cadangan dengan jumlah pemakaiannya tampak tidak seimbang, ini antara lain tergambar dari pasaran harga minyak yang semakin hari semakin tinggi.

Hal inilah yang menjadi alasan sejumlah negara melancarkan program pengembangan energi alternatif selain minyak, salah satu alternatifnya yang dimanfaatkan oleh beberapa negara adalah energi nuklir. Nuklir sendiri merupakan salah satu energi yang dewasa ini semakin banyak dimanfaatkan oleh banyak negara. Nuklir memang memiliki dampak negatif, namun dampak yang dihasilkan dapat dikurangi jika metode dan penggunaannya yang tepat.

Turut hadir Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional serta undangan lainnya.

UMKM Harus Diletakkan Dalam Koridor Kondisi, Perilaku Dan Budaya Usaha



Rabu, (26/3) Prof. Dr. Miyasto selaku Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ekonomi Lemhannas RI hadir sebagai salah satu pemapar dalam *Intellectual Exercise* yang diselenggarakan oleh Dewan Pengarah Lemhannas RI, di Gedung Tri Gatra Lt. III Timur Lemhannas RI.

Intellectual Exercise yang dibuka oleh Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI Dr. Ardi Patadinata, M.Sc merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkembangkan kehidupan akademik melalui pengasahan kemampuan knowledge dan skills para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI sesuai dengan bidang studi yang dikuasainya. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi Dewan Pengarah Lemhannas RI sebagai implementasi dari kebijakan umumnya.

Dalam paparannya yang

berjudul **“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional dalam rangka Kesejahteraan Masyarakat”**, Prof. Dr. Miyasto menyampaikan dalam makalahnya, meski indeks ketahanan nasional dalam 3 tahun terakhir berada dalam indeks kurang tangguh (Data Labkurtannas: 2,43 (2010), 2,44 (2011), 2,43 (2012)), tetapi pada gatra ekonomi justru cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut (Data Labkurtannas: 2,85 (2010), 2,86 (2011), 2,87 (2012)) dan berada pada indeks cukup tangguh dan menjadi gatra yang paling baik diantara gatra yang lainnya.

Namun menurutnya, kondisi tersebut belum memadai bagi Indonesia untuk bersaing pada tingkat regional (ASEAN) atau dunia, apalagi masih banyak indikator-indikator kunci dalam gatra ekonomi

yang justru berada dalam posisi rawan ataupun kurang tangguh. Hal ini mengakibatkan efek *spillover* pada ketahanan gatra-gatra lainnya dan ketahanan nasional secara agregat. Kondisi ini juga akan menjadi kendala bagi pencapaian visi pembangunan nasional Indonesia.

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang berbasis *resource and knowledge* dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang tersebut. Kini fenomena UMKM di Indonesia adalah spesifik. Oleh karena itu, menurutnya pemberdayaan UMKM harus di letakkan dalam koridor kondisi, perilaku dan budaya usaha dari UMKM di Indonesia. Sehingga hal ini akan meminimalisasi kendala dan hambatan baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi.

Selain Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. Miyasto, hadir pula sebagai pemapar Tenaga Ahli Pengajar Bidang Politik Dalam Negeri yang mengangkat tema “Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan guna Menjadi Bagian Integral Pertahanan RI yang Kokoh dalam rangka Ketahanan Nasional”.

Acara tersebut dihadiri oleh para Deputi, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta undangan lainnya.



Pembangunan di Papua Perlu Mendapatkan Prioritas

“Secara filosofis, implementasi otonomi khusus adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi dengan wilayah lainnya di Indonesia.”

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, dalam acara *Roundtable Discussion* “**Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Papua Guna Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia**” pada hari Senin (1/4) di Ruang Nusantara I, gedung Trigatra Lemhannas RI.

Otonomi khusus yang diungkapkan tersebut merupakan upaya serius dari pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum di Papua. Oleh karena itu, menurut Gubernur, sudah seharusnya seluruh komponen bangsa mendukung proses percepatan pembangunan di Papua agar masyarakat Papua bisa berkembang dan maju di daerahnya sendiri.

Hadir sebagai Pembicara adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ir. H. Helmy Faisal Zaini, Penjabat Gubernur Papua drh. Constant Karma dan Staf Khusus Presiden RI Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MSc. Sedangkan sebagai penanggap hadir Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen TNI (Purn) Bambang Dharmono, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, SH, Guru Besar Hukum Internasional Universitas UI Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, dan Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI/Pakar Papua Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa percepatan pembangunan di Papua memang perlu mendapatkan prioritas dari tahun ke tahun secara berkelanjutan, beberapa tantangan berat yang harus dihadapi seperti masih banyaknya kabupaten daerah tertinggal, persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran kepada rakyat membutuhkan kerja keras, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di wilayah Papua.

Secara faktual, adaptasi Papua ke dalam NKRI menjadi relatif lambat dan tersendat, hal ini dapat dilihat dari lambatnya pembangunan disegala bidang. Perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan disertai kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua. Hal ini juga akan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan yang menyejahterakan di Papua. Selain itu juga sangat diperlukan strategi rasional dan penuh kesungguhan terhadap percepatan pembangunan Papua serta dilandasi rasa kebangsaan Indonesia dengan diikuti komitmen bersama yang kuat, nyata dan berkesinambungan guna mewujudkan Papua yang mandiri, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Gubernur berharap dengan diselenggarakannya *Roundtable Discussion* ini, akan lahir pemikiran-pemikiran teoritis, konseptual maupun dari sisi praktis agar percepatan pembangunan Papua dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga Papua menjadi wilayah yang sejahtera dan memiliki daya saing dengan memberdayakan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan Universitas Mulawarman

Rabu (3/4), diselenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan Universitas Mulawarman bertempat di Ruang Tamu Pimpinan, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA sebagai pihak pertama dan Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. H. Zamruddin Hasim SE, SU sebagai pihak kedua.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara kedua pihak. Ruang lingkup yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah mencakup dalam hal pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, penelitian dan pengkajian strategik, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pengukuran ketahanan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, nantinya akan dapat ditindaklanjuti oleh kedua pihak yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman yang berlaku selama 5 (lima) tahun ini dimulai sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini dari pihak Lemhannas RI adalah Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, para Deputi, Karo Kerma, Karo Humas, Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI. Sedangkan dari pihak Universitas Mulawarman hadir Purek I, Purek IV, Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat, dan Kahumas serta Protokol Universitas Mulawarman.

Sekolah Bukan Sekedar Tempat Transfer of Knowledge

“Sekolah bukan sekedar tempat *transfer of knowledge* serta menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) saja, tetapi juga mengusahakan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*) dan merupakan sebuah usaha moral dalam dirinya sendiri, serta menjadi *living exemplary* untuk mengontrol pola perkembangan kebudayaan dan peradaban.”

Pernyataan tersebut terungkap saat Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA pada hari Kamis (4/4) saat membuka acara *Roundtable Discussion* kajian aktual yang bertema “**Pembangunan Manusia Yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya Dalam Rangka Ketahanan Nasional**” di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Prof. Dr. Sudaryono, SU menghadirkan pembicara seperti Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S, Anggota Dewan Pengarah Lemhannas RI Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA, dan Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas Bambang Wisudo. Disamping itu juga hadir sebagai Penanggap adalah Direktur Eksekutif Reform Institute Dr. Yudi Latif, Ketua Dewan Pembina The Center for Betterment of Education (CBE) Ahmad Risali, Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Jakarta (UNJ), dan Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI DR Adi Sujatno, Bc IP,

SH, MH.)

Pembentukan dan pendidikan karakter bangsa di sekolah dilakukan melalui penanaman nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila ditumbuhkan atau diinternalisasikan langsung pada diri anak didik. Proses pengembangan nilai-nilai Pancasila dilakukan secara menyeluruh, artinya mengintegrasikan setiap mata pelajaran (*substansiasing the values of Pancasila across the curriculum*), dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam menegakkan nilai-nilai akhlak, budi pekerti dan moral yang benar secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur, pengembangan pendidikan berkarakter dengan mengembangkan potensi diri dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi sangat strategis bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan keberlangsungan serta keunggulan bangsa di masa mendatang.

Peran pendidikan karakter yang begitu penting dan strategis sebagai bagian dari jati diri bangsa, maka diperlukan penataan dan restrukturisasi pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah pada tataran nasional maupun pada tataran satuan pendidikan, sehingga mampu membangun manusia yang berkarakter Pancasila.

Diharapkan dengan diselenggarakan *Roundtable Discussion* kajian aktual ini akan dapat memberikan kontribusi dan saran pemikiran yang cemerlang untuk membenahi sekaligus membangun sistem pendidikan nasional yang ideal dan sejalan dengan kebijakan maupun program yang telah dicanangkan pemerintah.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional serta para undangan lainnya.



Foto : Humas Lemhannas

Perlu Formulasi Kebijakan Untuk Perkuat Pembangunan Perekonomian Kelautan

Berempat di Ruang Nusantara I Gedung Trigatra, Deputy Pengkajian Strategis Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* yang mengangkat tema **“Pemanfaatan Sumber Daya Laut guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional”**. Kegiatan yang berlangsung pada hari Selasa (9/4) tersebut, dibuka oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Pengadaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Ir. Saut Parulian Hutagalung, M.Sc., Direktur Jenderal Minyak dan Gas Ir. A. Edy Hermanto, dan Dosen Fakultas ekonomi dan Managemen IPB Prof. Dr. Akhmad Fauzi, M.Sc. Sedangkan sebagai Penanggap hadir Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayjen TNI (Purn) Yusuf Solichien Martadiningrat, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. Panutan Sakti, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA., dan Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan.

“Pemberdayaan kelautan memerlukan dukungan politik dan keberpihakan yang nyata dari seluruh elemen bangsa”, ucap Sekretaris Utama saat membacakan *keynote Speech* Gubernur Lemhannas RI.

Menurutnya hal tersebut dilakukan dalam rangka menjadikan bidang kelautan sebagai sektor unggulan dalam memperkokoh perekonomian nasional.

Indonesia memiliki karakteristik perairan laut yang sangat spesifik karena berada di antara dua samudra besar dengan memiliki keanekaragaman jenis biota laut yang tinggi, seperti ikan terumbu karang, rumput laut dan berbagai vegetasi laut serta potensi lainnya seperti kandungan bahan mineral, minyak dan gas.

Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah besar, hal ini dapat meningkatkan pasokan pangan dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian rakyat, sekaligus dapat meningkatkan produksi untuk kemandirian bangsa dan memperoleh devisa Negara karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi apabila dikelola secara tepat.

Oleh karena hal itu, menurut Sekretaris Utama diperlukan suatu formulasi kebijakan kelautan (*ocean policy*) yang integral dan komprehensif yang nantinya menjadi payung politik bagi semua institusi Negara yang dapat memperkuat pembangunan perekonomian kelautan (*ocean economy*).

“untuk menjadikan kelautan sebagai *leading sector* dalam pembangunan, maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan”, jelas Sekretaris Utama lebih lanjut.

Selain Pembicara dan Penanggap, Hadir Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI, para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta para undangan lainnya.



Foto: Humas Lemhannas

Perumusan Isu-Isu Strategis Ketahanan Nasional

Rabu (10/4), Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) tentang Perumusan Isu-Isu strategis Ketahanan Nasional di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Roundtable Discussion yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA ini diselenggarakan guna melakukan validasi terhadap isu-isu strategis Ketahanan Nasional yang telah ditemukan Labkurtannas berdasarkan studi tahun 2012.

Hadir sebagai narasumber adalah Deputi Neraca Dan Analisis Statistik-BPS Kecuk Suhariyanto dan Direktur Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc., Ph.D

Kemiskinan, pengangguran, wilayah perbatasan dan *energy security* merupakan beberapa dari sekian isu-isu strategis yang berkembang sepanjang tahun 2012 lalu. Selain itu, masih tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah, ketergantungan ekonomi nasional pada luar negeri masih relatif tinggi, menurunnya kapasitas dan kualitas sumber kekayaan alam, pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai kebangsaan, sistem pemerintahan yang *good governance* masih dapat dikatakan belum berhasil, dan belum banyak tersedianya data penting bagi pembangunan dan ketahanan nasional juga menjadi isu-isu strategis yang berkembang di tahun 2012.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, Gubernur berharap dapat dilakukan penelaahan kembali terhadap isu-isu strategis tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang akurat tentang kebijakan publik yang perlu dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan nasional.

Turut hadir dalam *Roundtable Discussion*, Sekretaris Utama, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Generasi Muda Sebagai Role Model



Foto: Humas Lemhannas

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai bagian dan landasan konsolidasi demokrasi pada hakikatnya tidak dapat diserahkan pada proses alamiah yang faktualnya penuh turbulensi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Lemhannas RI yang juga menjadi tugas pokoknya dalam menyelenggarakan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa, pada hari Senin (15/4) Lemhannas RI menyelenggarakan upacara pembukaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Kalangan Pemuda Angkatan V Tahun 2013 yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Menurut Gubernur dalam sambutannya, pemuda sebagai *agent of change* harus berperan aktif untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat kearah yang lebih baik, pemuda harus mampu mewujudkan cita-cita besar sumpah pemuda sesuai kompetensi. Sebagai *agent of development*, pemuda harus berjuang membangun bangsa secara fisik maupun non fisik. Pemuda yang berperan sebagai *agent of modernization* bertindak sebagai pelopor dan juga sebagai inovator.

"...dalam hal ini, peranan semua komponen bangsa dan khususnya generasi muda sebagai *"role model"* untuk selalu meningkatkan rasa kebersamaan yang dilandasi oleh Nilai-nilai Kebangsaan sebagai kekuatan mengisi terwujudnya tujuan nasional", jelas Gubernur Lemhannas RI.

Sejarah telah menunjukkan betapa besarnya peran pemuda di masa lalu, generasi muda masa kini diharapkan dapat menjadi pilar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mengisi

pembangunan di era globalisasi yang diwarnai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan antar bangsa yang semakin tajam.

Gubernur berharap para pemuda dapat terus menempa diri menjadi pribadi yang matang secara intelektual untuk meningkatkan semangat pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaharuan dan pembangunan bangsa, diharapkan mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan empat consensus dasar nasional, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang berlangsung selama satu pekan ini diikuti 100 peserta yang berasal dari organisasi kepemudaan yang tersebar di seluruh Indonesia seperti KNPI, Gema Kosgoro, Pemuda Muhammadiyah, Srikandi Pemuda Pancasila, IPPNU, dan beberapa organisasi kepemudaan lainnya.



Foto: Humas Lemhannas



Foto : Humas Lemhannas

Peran Isteri/Suami Selaku Pendamping Peserta P3DA Sebagai Pimpinan Daerah Tidak Dapat Dikesampingkan

Jelang berakhirnya Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) VII Lemhannas RI, seperti pada Program Pendidikan Singkat maupun Reguler, diselenggarakan Penataran Istri/Suami dari para peserta P3DA selama 3 (tiga) hari di Lemhannas RI.

Penataran Istri/suami peserta P3DA yang dibuka oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Drs. Chandra Manan Mangan, MSc, diselenggarakan pada hari Senin (15/4) di Gedung Auditorium Lemhannas RI.

Keberhasilan para peserta P3DA VII Lemhannas RI dalam mengemban tugas negara tidak dapat dilepaskan dari dukungan peran isteri/suami selaku pendamping peserta P3DA sebagai pimpinan daerah. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya keharmonisan suami/isteri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika.

Oleh karena itu, kegiatan Penataran ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan

cakrawala pandang para isteri/suami sejalan dengan makin berkembangnya wawasan dan pengetahuan serta cakrawala para peserta P3DA VII setelah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Namun pada dasarnya, penataran ini untuk menyiapkan para isteri/suami, agar lebih mantap melaksanakan peranannya dalam membantu dan mendampingi suami/isteri, dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Dengan bekal yang diperoleh selama penataran hendaknya dapat didayagunakan secara optimal di lingkungan keluarga, kantor dan organisasi serta di kalangan masyarakat yang merupakan andil di dalam ikut serta menciptakan kondisi ketahanan nasional di kalangan masyarakat.

Hadir dalam Upacara Pembukaan tersebut, Ketua dan segenap pengurus Perista Lemhannas RI serta undangan lainnya



GEBYAR ANNIVERSARY

Enam 48th Winda

LEMHANNAS RI
20 MEI 1965 - 20 MEI 2013

Menyelenggarakan Kegiatan
Kebersamaan dengan Masyarakat

- Gowes Sepeda (Sepeda Santai)
19 Mei 2013
- Pagelaran Wayang Kulit
24 Mei 2013

